

Analisis Krisis Fiskal di Bali Tahun 2025: Systematic Literature Review Terhadap Defisit Anggaran dan Reformasi Kebijakan Publik

Putu Indayani Madya Hesti Gunarsa^{1*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani², Nyoman Diah Utari Dewi³

Fakultas Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Bali

Corresponding author: Putuindayanimhg23110111@gmail.com, dayusriwid@gmail.com, diah.utari@unr.ac.id

Diterima: 14 Juli 2025 Direvisi : 25 Juli 2025 Disetujui : 25 Juli 2025

ABSTRACT

Purpose of this study is to see how Bali's fiscal crisis is expected to occur in 2025 due to a budget deficit of Rp. 691 billion and evaluate the public policy reforms that can be carried out to deal with it.

Method This study uses a literature review system (SLR) to review various literature on regional fiscal policy, budget deficit management, and the implementation of public policy reform in the context of local government.

Findings show that the main factors causing Bali's budget deficit are low level of effectiveness, dependence on the tourism industry, and imbalance between regional revenue and expenditure.

Implication of this study emphasize the importance of more adaptive and innovative fiscal planning to create a more stable and sustainable regional financial system in the future.

Keywords: Budget Deficit, Fiscal Crisis, Public Policy Reform, Regional Finance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana krisis fiskal Bali yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025 karena defisit anggaran sebesar Rp. 691 miliar dan mengevaluasi reformasi kebijakan publik yang dapat dilakukan untuk menanganinya

Metode Penelitian ini menggunakan sistem tinjauan literatur (SLR) untuk meninjau berbagai literatur tentang kebijakan fiskal daerah, pengelolaan defisit anggaran, dan pelaksanaan reformasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan daerah.

Hasil menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan defisit anggaran Bali adalah tingkat efektivitas yang rendah, ketergantungan pada industri pariwisata, dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan fiskal yang lebih adaptif dan inovatif guna menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: Defisit Anggaran, Krisis Fiskal, Reformasi Kebijakan Publik, Keuangan Daerah

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah menghadapi salah satu masalah terbesar dalam mengelola keuangan publik, yaitu krisis fiskal. Secara umum, krisis fiskal terjadi ketika ada defisit anggaran atau ketidakseimbangan yang signifikan antara penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah (Septiani, 2023). Kejadian ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang optimal serta melaksanakan program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Krisis fiskal Bali tahun 2025 menarik perhatian karena berdampak pada banyak industri penting di Bali.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp.691 miliar pada tahun 2025, atau sekitar 5,8% dari anggaran daerah yang direncanakan. Defisit ini menjadi perhatian utama karena dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah Bali menghadapi tantangan dalam mengelola defisit anggaran ini dengan bijak untuk memastikan pembangunan dan penyediaan layanan publik terus berlanjut. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan (Gunawan & Bahari, 2024).

Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif untuk kepentingan publik. Menurut RAPBD 2025, defisit anggaran sebesar Rp.691 miliar menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan dan belanja daerah. Diperkirakan pendapatan daerah Bali pada tahun 2025 akan mencapai sekitar Rp.11,8 triliun, sementara belanja daerah yang diusulkan mencapai Rp.12,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran yang terjadi akan mencakup sekitar 5,8% dari total anggaran, menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan dan belanja daerah.

Akuntabilitas publik sangat penting dalam menghadapi defisit ini, dan penting untuk diingat. Selain mencapai target pendapatan, pemerintah daerah Bali harus memastikan bahwa pengeluaran daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan fiskal (Lathifah dkk., 2024). Reformasi kebijakan fiskal yang mendasar harus dilakukan oleh pemerintah Bali untuk mempertahankan keberlanjutan anggaran jangka panjang, efisiensi pengeluaran, dan peningkatan pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan.

Reformasi ini juga harus mencakup pengembangan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih modern dan berbasis pada prinsip good governance, yang mengedepankan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik. Selain itu, pemerintah Bali harus mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan lain, seperti kerja sama dengan sektor swasta melalui *Public-Private Partnership (PPP)*, untuk mengatasi kekurangan anggaran dan mendorong pembangunan infrastruktur yang akan menguntungkan perekonomian Bali dalam jangka panjang (Baidarus dkk., 2023). Strategi ini dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat dan membuka peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek pembiayaan.

Berdasarkan fenomena terkait Perkiraan RAPBD Bali 2025 Defisit Rp.691 M, Perlu Transparansi untuk Akuntabilitas Publik, dalam hal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam informasi tentang konsep transparansi anggaran dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi ini dilakukan untuk melakukan praktik analisis pada sebuah fenomena terkait defisit anggaran daerah serta upaya reformasi kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal di Bali. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan konsep pengetahuan dan wawasan baru tentang peran transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik pada praktik administrasi publik di tingkat daerah, khususnya dalam mengatasi krisis fiskal yang sedang dihadapi oleh

pemerintah Bali.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

Teori Krisis Fiskal

Teori fiskal digagas oleh Richard M. Bird dan Jorge Martinez-Vazquez (1990), dimana teori ini bertujuan untuk membahas tentang ketidakseimbangan antara pendapatan negara atau daerah dan pengeluaran biasanya dikaitkan dengan krisis fiskal dalam administrasi publik. Menurut Kettl (2000), teori krisis fiskal berkonsentrasi pada bagaimana ketidakseimbangan anggaran berdampak pada kinerja pemerintah dan ekonomi sebuah negara. Krisis fiskal dapat berdampak pada pelayanan publik, daya saing ekonomi, dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan. Dalam hal ini, krisis fiskal yang tercermin dalam defisit anggaran di tahun 2025 dapat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan penyebab krisis fiskal, seperti ketergantungan pada industri tertentu, seperti pariwisata, dan ketidakstabilan pendapatan regional.

Penelitian (Judijanto dkk., 2024) memberikan pemahaman penting tentang bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Studi ini menunjukkan bagaimana strategi pengelolaan utang dapat berdampak pada defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam penelitian ini menjadi relevan dalam konteks defisit RAPBD Bali 2025 yang diperkirakan mencapai Rp.691 miliar, terutama dalam hal keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas pemerintah daerah. Agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang, perencanaan fiskal yang matang harus digunakan untuk mengimbangi ketergantungan pada utang atau pembiayaan alternatif untuk menutupi defisit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, langkah-langkah strategis seperti transparansi dalam pengelolaan utang dan optimalisasi sumber pendapatan daerah dapat diterapkan.

Reformasi Kebijakan Fiskal

Teori reformasi kebijakan fiskal dicetuskan oleh Aaron Wildavsky (1988), dimana teori ini bertujuan untuk membahas tentang reformasi kebijakan fiskal yang menjadi langkah penting dalam pengelolaan anggaran dalam menghadapi krisis fiskal. Wildavsky (1988) menawarkan teori Reformasi Kebijakan Fiskal yang menekankan betapa pentingnya memperbarui sistem anggaran pemerintah dalam hal perencanaan, pengumpulan pendapatan, dan pengelolaan pengeluaran. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan, keberlanjutan, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan diversifikasi sumber pendapatan adalah reformasi kebijakan fiskal yang sangat penting di Bali, yang memiliki defisit anggaran.

Penelitian (Fuat & Djasuli, 2024) membahas betapa pentingnya reformasi kebijakan anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi keuangan daerah. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem penganggaran yang lebih berbasis kinerja dapat membantu daerah mengelola sumber daya keuangan secara lebih efisien. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks defisit RAPBD Bali 2025 yang mencapai Rp.691 miliar karena perlunya reformasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah untuk menjadikannya lebih berkelanjutan. Reformasi anggaran yang menekankan transparansi dan akuntansi yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengurangi defisit dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan basis teoretis yang kuat untuk mendukung bahwa tata kelola keuangan daerah harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah fiskal di Bali.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Teori transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik digagas oleh Anwar Shah (2007), dimana teori ini bertujuan untuk membahas dua prinsip yang sangat penting dalam administrasi publik untuk mengelola anggaran dan keuangan negara atau daerah. Menurut Shah (2007), teori transparansi anggaran mengatakan bahwa penyusunan dan pengelolaan anggaran harus transparan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Selain itu, hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi anggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Menurut penelitian (Ramadana dkk., 2023) membahas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti bagaimana pendapatan dan belanja daerah dikelola dengan baik, anggaran transparan, dan kapasitas fiskal. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks defisit RAPBD Bali 2025 sebesar Rp.691 miliar karena menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, seperti pariwisata, yang rentan terhadap perubahan ekonomi, dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal. Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang jelas juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memastikan bahwa alokasi belanja daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas. Untuk mengurangi risiko defisit, reformasi kebijakan fiskal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Akibatnya, penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk memahami bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah dapat menjadi cara untuk menyelesaikan masalah

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Diversifikasi Pendapatan

Teori pengelolaan keuangan daerah dan diversifikasi pendapatan digagas oleh Richard M. Bird dan John Mikesell (1990), dimana teori ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan yang tidak stabil, diversifikasi sumber pendapatan diperlukan, menurut Tanzi (2000). Keuangan Bali sangat sensitif terhadap perubahan pasar karena kota sangat bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utamanya.

Penelitian Handraini dkk., (2024) menyoroti bagaimana stabilitas keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Studi ini menemukan bahwa kemandirian fiskal di daerah dengan PAD yang rendah lebih rendah dan lebih rentan terhadap defisit anggaran. Dalam konteks defisit RAPBD Bali 2025 sebesar Rp.691 miliar, temuan ini penting karena Bali bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber PAD utamanya. Perubahan pendapatan di sektor ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal saat kunjungan wisatawan menurun atau ekonomi dunia turun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi risiko defisit anggaran yang berulang, diversifikasi sumber pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan PAD menjadi strategi penting.

3. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *literature review*. *Literature review* merupakan sebuah metode atau pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, merangkum, dan mengevaluasi hasil penelitian dan perspektif dari berbagai pakar atau peneliti sebelumnya (Priharsari, 2022). Metode penelitian ini meliputi pencarian, mereview hasil penelitian, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan dari literatur terkait. Sumber literatur yang digunakan berkaitan dengan topik, fenomena atau isi yang akan dibahas oleh peneliti sesuai konsep topik penulisan yang diambil dan dapat diperoleh melalui database, seperti google scholar dan referensi 10 artikel jurnal. Menurut Priharsari (2022), proses *literature review* terdiri dari empat tahap, pada tahap pertama, peneliti merencanakan untuk

mengumpulkan materi untuk ulasan dari berbagai artikel dan literatur lain. Pada tahap kedua, mereka memeriksa dan mengevaluasi literatur yang relevan untuk memastikan bahwa hasil tinjauan terkait dengan topik artikel. Pada tahap ketiga, mereka menganalisis hasil tinjauan di berbagai literatur sesuai dengan pedoman penulisan artikel. Pada tahap keempat, peneliti menyusun hasil dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan serta hasil tinjauan literatur dari artikel yang telah direview.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Nama Penulis Artikel	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Jurnal (jika tersedia)	Volume, Nomor	Halaman
1	Indriani Restu, Neneng Dahtiah	2023	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019-2021)	-	Vol. 4 No. 1	9-19
2	Nuraisah, Reydina Pasya Amanda, Salsabila Rambe, Maryam Batubara	2024	Analisis Imbas Defisit Anggaran terhadap Perekonomian di Indonesia	-	Vol. 3 No. 2	1191-1203
3	Andi Djalante	2022	Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan: Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone	-	Vol. 5 No. 1	685-697
4	Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo	2021	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	-	Vol. 10 No. 6	1-15
5	Nadira Hilmi Israr, Efrizal Syofyan	2022	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	Vol. 4 No. 4	686-697
6	Praycilia Elisabeth, FX Sugiyanto	2024	Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah Terhadap Pertumbuhan	-	Vol. 10 No. 3	184-207

No	Nama Penulis Artikel	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Jurnal (jika tersedia)	Volume, Nomor	Halaman
7	Indra Kristian, Rira Nuradhwati, Harky Ristala	2024	Ekonomi di Indonesia Tahun 1990–2019 Peran E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)	-	Vol. 7 No. 2	252–263
8	Diah Riski Hardiana	2023	Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021	-	Vol. 8 No. 2	321–338
9	Yayat Sudrajat	2024	Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)	-	Vol. 8 No. 2	1954–1965
10	Andi Fitri Rahmadany	2024	Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile Government pada Reformasi Birokrasi 4.0	-	Vol. 16 No. 2	195–209

Sumber : diolah

Pembahasan

Penelitian Restu & Dahtiah (2023), membahas tentang struktur APBD yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, sebagai penyebab defisit anggaran di Kabupaten Bandung Barat pada 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian RKPD dan krisis ekonomi mengubah alokasi belanja, khususnya belanja pegawai, yang menyebabkan defisit anggaran. Faktor lain yang memperburuk keadaan keuangan daerah termasuk kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Dalam RAPBD Bali 2025, situasi serupa juga diantisipasi; meningkatnya kebutuhan belanja daerah dan masalah fiskal dapat menyebabkan defisit yang signifikan. Oleh karena itu, langkah strategis untuk mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan adalah menerapkan transparansi, akuntabilitas, perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Penelitian Nuraisah dkk., (2024) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang karena ketergantungan daerah yang tinggi pada dana perimbangan. Kondisi serupa terlihat pada perkiraan RAPBD Bali 2025, yang mengalami defisit Rp. 691 miliar. Ini menunjukkan bahwa, meskipun PAD meningkat, masih ada kesenjangan dalam pembiayaan kebutuhan daerah. Defisit ini menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus transparan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan efektivitas kebijakan fiskal daerah. Pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dana pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal dengan memperkuat rencana peningkatan PAD dan mengelola dana perimbangan secara lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian di Pasaman Barat dapat membantu Bali membuat kebijakan keuangan yang lebih jelas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Penelitian Djalante (2022) membahas tentang bagaimana cara reformasi kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini masih ada di banyak tempat. Ini terbukti dengan perkiraan RAPBD Bali 2025 yang mengalami defisit Rp. 691 miliar. Untuk membuat alokasi anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, defisit ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah harus lebih jelas dan akuntabel. Studi Kabupaten Bone menekankan bahwa prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan untuk meningkatkan kontrol pendapatan dan belanja daerah dan mengurangi risiko ketidakseimbangan fiskal. Oleh karena itu, untuk mengatasi defisit dan meningkatkan stabilitas keuangan daerah, pemerintah daerah Bali harus menerapkan metode perencanaan keuangan yang lebih komprehensif dan berbasis data.

Penelitian Nauw (2021) membahas tentang bagaimana elemen keuangan daerah, seperti PAD, dana perimbangan, dan belanja modal, berdampak pada seberapa efektif pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan kasus perkiraan RAPBD Bali 2025 yang mengalami defisit Rp. 691 miliar, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD terus meningkat, bergantung pada dana perimbangan dan alokasi belanja modal yang buruk dapat memperburuk krisis fiskal. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pendekatan kebijakan yang lebih efisien diperlukan untuk meningkatkan PAD dan mengoptimalkan belanja modal. Dalam jangka panjang, Bali dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi risiko defisit dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian Israr & Syofyan (2022) menunjukkan bahwa membuat anggaran berbasis kinerja dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik adalah cara penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Ini berkaitan dengan perkiraan RAPBD Bali 2025 yang mengalami defisit Rp. 691 miliar, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah harus diperbaiki. Tanpa penerapan anggaran berbasis kinerja yang efektif, risiko ketidakefisienan belanja daerah meningkat, yang dapat memperburuk kondisi fiskal Bali. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan serta memastikan bahwa setiap alokasi belanja daerah harus memperbaiki. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat menjaga akuntabilitas publik dan mengurangi defisit anggaran.

Penelitian Elisabeth & Sugiyanto (2024) menunjukkan bahwa defisit anggaran dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan cara yang baik atau buruk, tergantung pada cara pengelolaan utang dan efisiensi alokasi belanja. Hal ini menunjukkan kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan sumber pendapatan daerah, terutama dalam konteks RAPBD Bali 2025, yang diperkirakan mengalami defisit Rp. 691 miliar. Ketergantungan pada pembiayaan utang dapat meningkat jika defisit tidak dikelola dengan baik. Ini berisiko membebani fiskal daerah di masa mendatang. Akibatnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan yang berfokus pada belanja produktif diperlukan. Bali dapat mengurangi dampak negatif defisit dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan menerapkan strategi pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Penelitian Kristian dkk., (2024) membahas tentang penggunaan teknologi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini relevan untuk perkiraan RAPBD Bali 2025 yang mengalami defisit Rp. 691 miliar. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik. Pemerintah daerah Bali dapat memperluas akses ke informasi yang lebih terbuka tentang pendapatan, belanja, dan kebijakan pengelolaan defisit dengan menerapkan e-government secara efektif. Langkah ini tidak hanya memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat dan pemangku kepentingan, tetapi juga membantu dalam pembentukan strategi fiskal yang lebih baik. Oleh karena itu, digitalisasi sistem pemerintahan dapat membantu mengatasi masalah keuangan daerah secara lebih berkelanjutan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian Hardiana (2023) membahas tentang pentingnya kebijakan transfer dana yang tepat untuk mendukung independensi fiskal daerah melalui pengelolaan yang efektif dan terbuka. Di sini, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan mereka tanpa bergantung pada dana pusat secara berlebihan. Kasus Perkiraan RAPBD Bali 2025, yang mengalami defisit Rp. 691 miliar, menunjukkan bahwa keadaan fiskal semakin memburuk karena ketergantungan yang besar pada dana perimbangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel, sangat penting untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang jelas. Transparansi dalam pengelolaan anggaran akan meningkatkan akuntabilitas publik dan membantu mengatasi defisit anggaran jika Bali dapat menerapkan kebijakan ini dengan lebih efisien.

Penelitian Sudrajat (2024) membahas tentang pentingnya reformasi tata kelola untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan daerah. Dalam hal ini, penerapan reformasi tata kelola yang baik dapat membantu daerah mengelola sumber daya dan anggaran secara lebih efisien. Kasus perkiraan RAPBD Bali 2025 yang mengalami defisit Rp. 691 miliar menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Bali memerlukan peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi. Dengan menerapkan reformasi tata kelola, Bali dapat memastikan bahwa alokasi anggaran lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan sambil meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu, reformasi administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan di Bali untuk mengatasi defisit dan menjaga stabilitas fiskal.

Penelitian Rahmadany (2024) membahas tentang seberapa pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengubah pemerintahan menjadi lebih responsif dan efisien, terutama dalam hal reformasi birokrasi menuju era 4.0. Diharapkan adopsi teknologi digital ini akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Kasus Perkiraan RAPBD Bali 2025 dengan defisit Rp. 691 miliar menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan harus lebih transparan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal saat ini. Dengan memasukkan teknologi ke dalam sistem keuangan daerah, pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih baik karena meminimalkan risiko kebocoran dan ketidakefisienan alokasi belanja. Akibatnya, untuk mengurangi defisit, Bali harus mengoptimalkan penggunaan sistem digitalnya. Ini akan memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berbasis data.

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah Bali akan menyebabkan krisis fiskal sebesar Rp 691 miliar pada tahun 2025. Dengan peningkatan PAD, ketergantungan yang kuat pada dana perimbangan dan alokasi belanja yang tidak efisien memperburuk keadaan. Pemicu utama krisis fiskal ini termasuk pengelolaan anggaran yang tidak transparan, ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, dan pengelolaan belanja modal yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Bali harus meningkatkan akuntabilitas dalam sistem administrasi pemerintahan dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

Untuk mengatasi defisit fiskal ini, Bali harus menerapkan strategi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan memaksimalkan potensi PAD. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan lokal dan mengoptimalkan belanja modal adalah cara untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan pusat. Untuk menjamin pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berkelanjutan, juga diperlukan penerapan prinsip good governance, reformasi tata kelola, dan integrasi kebijakan fiskal dan moneter. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah Bali secara keseluruhan akan didorong oleh penggunaan teknologi dan e-government, yang dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengawasan yang lebih ketat.

5. Kesimpulan

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah menyebabkan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 691 miliar di RAPBD Bali 2025. Sangat penting untuk menerapkan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ini karena, meskipun PAD meningkat, pengelolaan belanja yang tidak efisien dan ketergantungan pada dana perimbangan pusat memperburuk kondisi fiskal Bali. Untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, pemerintah Bali harus memaksimalkan potensi PAD dan mengelola belanja modal dengan cara yang paling efisien. Untuk meningkatkan stabilitas keuangan daerah, juga penting untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, reformasi tata kelola yang jelas, dan integrasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat. Teknologi dan e-government dapat membantu membuat pengelolaan anggaran daerah lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dapat ditingkatkan dengan penerapan sistem digital yang lebih terbuka. Selain itu, pengoptimalan belanja modal dan PAD harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas manajemen sumber daya keuangan daerah. Anggaran akan dialokasikan dengan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah sambil mempertahankan akuntabilitas publik melalui reformasi tata kelola yang baik. Dengan melakukan tindakan ini, Bali dapat mencapai keberlanjutan fiskal yang lebih baik dan mengurangi efek negatif dari defisit anggaran.

Daftar Pustaka

- Baidarus, M., Febriano, D., Mubarok, D. A., & Ramadhani, M. A. (2023). Kajian Sistematis Kebijakan Skema Pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Kpbu) Pada Sektor Perumahan Guna Mengatasi Backlog Di Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.711>
- Djalante, A. (2022). Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan : Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(1), 2022–2685. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1900>
- Dwi Septiani, F. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2180–2192. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756>
- Elisabeth, P., & Sugiyanto, F. (2024). Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 184–207. <https://doi.org/10.14710/djoe.31444>
- Fuat, F., & Djasuli, M. (2024). Literatur Review: Reformasi Anggaran Daerah Dan Akuntansi Keuangan Daerah. *Growth*, 22(1), 125. <https://doi.org/10.36841/growth-journal.v22i1.4333>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 609–618. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Hardiana, D. R. (2023). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 321–338.
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 686–697. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550>

- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(02), 223–233. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>
- Kristian, I., Nuradhwati, R., Ristala, H., Jenderal Achmad Yani Cimahi, U., Terusan Jend Sudirman, J., Cimahi Selatan, K., Cimahi, K., & Barat, J. (t.t.). *JURNAL ACADEMIA PRAJA* <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja>
- Peran E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). <https://doi.org/10.36859/jap.v7i2.2837>
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Eka Putri, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Dareah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Dalam Jurnal Professional* (Vol. 11, Nomor 2).
- Nauw, E. T. (t.t.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Nuraisah, N., Amanda, R. P., Rambe, S., & Batubara, M. (2024). Analisis Imbas Defisit Anggaran terhadap Perekonomian di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.292>
- Priharsari, D. (2022). Systematic literature review di bidang sistem informasi dan ilmu komputer. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(2), 263–268.
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v16i2.4809>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Restu, I., & Dahtiah, N. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019-2021). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 9–19.
- Sudrajat, Y. (2024). Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1954. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.2169>